

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kenyataan akan keberagaman Indonesia telah diakui di tingkat internasional bahwa masyarakat Indonesia baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan masyarakat paling majemuk di dunia selain Amerika Serikat dan India.<sup>1</sup> Menurut data sensus BPS Tahun 2010 ada sekitar 300 kelompok etnik, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa yang didominasi etnis Jawa mencapai 41% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Sebenarnya, keanekaragaman etnis ini termasuk kategori perbedaan sosial secara horizontal atau dalam sosiologi di kenal dengan istilah diferensiasi sosial.<sup>3</sup>

Secara historis, perkembangan etnis di Indonesia khususnya etnis Jawa kian menyebar lewat program transmigrasi yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda Tahun 1905 di kenal dengan *Kolonisatie*,<sup>4</sup> berlanjut di era Orde Lama dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 29 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi, dan puncaknya ketika masa Orde Baru yang menjadikan transmigrasi sebagai program tetap dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Menariknya, di era otonomi daerah penyelenggaraan transmigrasi bertransformasi dari yang sebelumnya sentralistik

---

<sup>1</sup> Sudiadi (2009) dalam Agus Joko Pitoyo dan Hari Triwahyudi. 2017. *Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara. Jurnal Populasi*. 25 (1).

<sup>2</sup> Merujuk pada Data Sensus Penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010.

<sup>3</sup> Diferensiasi sosial adalah klasifikasi masyarakat secara horizontal misalnya, perbedaan ras, suku bangsa, klan dan agama. Sedangkan, perbedaan vertikal atau stratifikasi sosial digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam kelas-kelas sosial yang berdasarkan kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan.

<sup>4</sup> *Kolonisatie* atau Kolonisasi berawal dari pidato Ratu Wilhelmina pada Desember 1901 mengenai tuntutan Politik Etnis bersamaan dengan edukasi dan irigasi, bertujuan mengurangi kemiskinan penduduk Pulau Jawa akibat sistem tanam paksa (kultur stelsel). Faktanya, kolonisasi ini dilakukan untuk mempekerjakan penduduk Jawa di perkebunan Belanda dengan upah minimum, disisi lain juga untuk mengasingkan penduduk yang berani menentang dan dianggap membahayakan Pemerintahan Hindia Belanda, salah satunya pengasingan Pangeran Diponegoro.

menjadi lebih terdesentralisasi, bahkan ada 63 kawasan transmigrasi masuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Melalui kebijakan otonomi daerah diharapkan terjadinya pemerataan akses dan kesempatan khususnya secara politik, terutama dalam menentukan pemimpin daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah.<sup>5</sup> Sayangnya, kebijakan tersebut dijadikan sebagai landasan perumusan kembali dalam penguatan garis-garis eksklusivisme dan parokhialisme, akibatnya muncul berbagai isu politik identitas.<sup>6</sup> Realitas euforia pelaksanaan otonomi daerah yang membangkitkan kembali gerakan politik identitas ini, justru membuat perjalanan demokrasi lokal di Indonesia masih terjebak dalam lingkaran bias etnosentrisme dan terus mengalami regresi.<sup>7</sup> Sebab hakikatnya, demokrasi menghendaki adanya nilai-nilai kebebasan (*liberty*), persamaan (*egalite*) serta keadilan (*equality*), dan tentunya ini tidak sejalan dengan praktik politik identitas.<sup>8</sup>

Francis Fukuyama (2018) dalam bukunya *Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition*, menjelaskan kemerosotan demokrasi global dengan menguatnya politik identitas dan nasionalisme sempit dalam demokrasi liberal modern. Bahkan, Fukuyama menyatakan politik identitas sebagai ancaman terhadap martabat manusia dan demokrasi pada abad 21.<sup>9</sup> Hal

---

<sup>5</sup> Pemilihan kepala daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan pemimpin daerah yang diinginkan oleh masyarakat, agar pelaksanaan otonomi daerah terselenggara dengan efektif dan efisien.

<sup>6</sup> Eksklusivisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa pandangan kelompoknya yang paling benar. Sedangkan, ciri utama dari Parokhialisme ini kepatuhan dan ketaatan. Sehingga, dengan menyuguhkan isu politik identitas sangat mudah berpengaruh bagi perilaku politik masyarakat, dan inilah yang kemudian menyebabkan demokrasi berada di pusaran Parokhialisme politik.

<sup>7</sup> Gejala etnosentrisme dalam kajian politik identitas menganggap etnisnya lebih baik dari etnis lainnya. Sejalan dengan Myron W. Lustig bahwa etnosentrisme adalah kepercayaan bahwa adat, tindakan, nilai-nilai budaya sendiri adalah yang paling baik (*superior*) dibandingkan dengan budaya lainnya.

<sup>8</sup> Politik identitas pada dasarnya dimaknai sebagai suatu tindakan individu atau kelompok dalam politik yang mengutamakan perebutan kekuasaan dengan landasan kesamaan identitas, kesamaan yang dimaksud yaitu pada, ras, etnisitas, jender atau keagamaan. (dalam Sri Astuti Buchari. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm 20)

<sup>9</sup> Kabartanahpapua. 2018. *Politik Identitas dan Resesi Demokrasi*. Diakses dari, <https://www.kabartanahpapua.com/politik-identitas-dan-resesi-demokrasi/>. Pada tanggal 07 Maret 2021 pukul 08:21 WIB.

tersebut sejalan dengan hasil riset Bawaslu Tahun 2017, bahwa demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap kelompok identitas untuk turut berpartisipasi dan mencapai kepentingannya. Akan tetapi, politisasi identitas juga berpeluang melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.<sup>10</sup>

Tepatnya setelah masa Pemerintahan Orde Baru berakhir, refleksi demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada isu etnosentrisme yang dibawa oleh aktor politik untuk dimanfaatkan sebagai alat dalam memperoleh kekuasaan secara praktis. Menurut perspektif Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa, kehadiran politik identitas pada masa kini merupakan antitesis dari kekuatan politik yang sentralistis dan hegemonik selama Orde Baru berkuasa,<sup>11</sup> artinya dengan dinamika masyarakat lokal yang masih dipengaruhi sistem etnosentrisme ini menjadikan politik identitas etnis menjelma sebagai daya tawar (*bargaining power*) dalam arena politik lokal khususnya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Keberadaan politik identitas etnis secara masif direpresentasikan dengan munculnya beberapa gerakan politik yang mengusung kebangkitan etnisitas, salah satunya dengan memanfaatkan paguyuban etnis. Walaupun, seyogianya paguyuban merupakan wadah bagi kelompok etnis terutama pendatang, untuk melindungi eksistensi budaya dan upaya menghindari marginalisasi dalam tatanan sosial masyarakat. Ferdinand Tonnies dalam karya *Gemeinschaft und Gesellschaft* (1887),<sup>12</sup> mengartikan paguyuban (*Gemeninschaft*) sebagai bentuk kehidupan bersama di mana dari setiap anggotanya diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah dan kekal, berarti ada karakteristik yang melekat dalam diri paguyuban yakni *Sense of Community*. Sehingga, menimbulkan kesadaran akan hubungan kekerabatan yang didasari persamaan identitas etnis antar anggotanya.

---

<sup>10</sup> Ari Ganjar Herdiansah. 2017. Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*. 3 (2).

<sup>11</sup> Budiman Sudjatmiko (2012) dalam Arif Budiman. 2012. Otonomi Daerah, Penguatan Politik Identitas dan Pengaruhnya terhadap Integrasi Nasional. *Jurnal Sawala Administrasi Negara*. 1 (1).

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 144

Secara teoretis, paguyuban etnis merupakan kelompok kepentingan<sup>13</sup> yang tidak hanya untuk menjalankan fungsi artikulasi kepentingan kelompoknya namun, tidak jarang selalu berusaha agar anggota-anggotanya terwakili dalam komisi-komisi. Sebagaimana dikatakan Gabriel A. Almond bahwa, kelompok-kelompok kepentingan berbeda-beda dalam struktur, gaya, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya.<sup>14</sup> Perbedaan tersebut sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Dengan kata lain, kelompok kepentingan ini ikut berorientasi ke berbagai aspek kehidupan termasuk masalah-masalah kekuasaan pemerintahan.

Keterlibatan kelompok kepentingan dalam aktivitas politik menjadi suatu hal lumrah, mengingat kelompok kepentingan merupakan bagian dari infrastruktur pemerintah serta dalam jalannya sistem demokrasi kelompok kepentingan berperan sebagai katalisator penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dibenarkan Nasikun bahwa kelompok kepentingan merupakan kelompok sekunder, tetapi juga merupakan kelompok yang berkenaan dengan perkumpulan-perkumpulan bersifat politis.<sup>15</sup>

Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam bukunya *Comparative Politics* (1980),<sup>16</sup> mengkategorikan 4 (empat) tipe kelompok kepentingan yaitu; anomik, non-asosiasional, institusional, serta asosiasional.<sup>17</sup> Dengan demikian,

---

<sup>13</sup> Kelompok kepentingan terbentuk akibat adanya kesamaan kepentingan-kepentingan antar individu. Sehingga mereka mengartikulasikan kepentingan tersebut dengan menggabungkan diri dalam kelompok. Hal ini dilakukan agar kepentingan tersebut dapat terealisasi karena memiliki *bargaining* yang tinggi. Sedangkan, menurut Gabriel A. Almond Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik.

<sup>14</sup> Hand Out Teori-Teori Politik. Ahmad Sholikin. 2016. Universitas Islam Darul 'Ulum. Lamongan

<sup>15</sup> Haniah Hanfie dan Ana Sabhana Azmy. 2018. *Kekuatan-Kekuatan Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 8.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Kelompok anomik terbentuk secara spontan dan hanya sekatika saja, sehingga kegiatan yang dilakukanpun merupakan spontanitas, tidak memiliki norma-norma atau aturan-aturan dan nilai-nilai yang jelas. Sedangkan, kelompok non-asosiasional biasanya bersifat persamaan latar belakang atau identitasnya, kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial. Berbeda dengan kelompok institusional bersifat formal, terorganisir secara rapi dan teratur, anggota kelompok ini terdiri dari orang-orang profesional di bidangnya dan mereka memiliki rencana kerja yang tersusun rapi seperti: PGRI, militer, birokrasi. Terakhir, kelompok

paguyuban etnis digolongkan sebagai kelompok kepentingan non-associasional yang diorganisasikan secara informal dan dalam mengartikulasi kepentingan kelompoknya melalui individu-individu atau tokoh-tokoh yang disepuhkan dalam komunitasnya.

Pada umumnya, cakupan paguyuban etnis terbatas pada aspek sosial dan kebudayaan. Namun, campur tangan atau keterlibatan paguyuban dalam aktivitas politik bukanlah sesuatu yang baru, misalnya di beberapa kasus ketika masa kampanye banyak kandidat mendekati diri dengan paguyuban. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya sumber-sumber kekuatan politik yang dimiliki paguyuban sehingga menempatkannya diposisi tawar tersendiri. Ada sesuatu yang berbeda ketika kita membandingkan antara paguyuban etnis dengan kekuatan politik populer seperti: militer, dan partai politik. Salah satu keunggulan paguyuban etnis yang membuatnya berbeda dari kekuatan politik lain adalah dengan adanya ikatan solidaritas yang berasal dari kesamaan identitas etnisnya.

Beberapa penelitian sebelumnya tidak banyak mengkaji keberadaan paguyuban berlatar etnis dalam ajang kontestasi politik lokal. Kebanyakan penelitian terfokus pada isu politik identitas dan hanya secara implisit mengaitkan dengan kontribusi paguyuban etnis dalam pilkada, seperti penelitian yang pernah diteliti oleh Akbar Riyadi, Zainal Arifin dan Aidinil Zetra (2018) dengan judul “Politik identitas masyarakat Jawa Pasaman dalam Pilkada di Kabupaten Pasaman Barat”. Penelitian dari Jovano Deivid Oleyver Palenewen (2021) berjudul “Politik Etnisitas: Survivalitas Etnis Melayu melalui Majelis Adat Budaya Melayu dalam Perpolitikan di Kalimantan Barat” lebih menekankan pergerakan politik etnis Melayu melalui Majelis Adat Budaya Melayu dalam perpolitikan Kalimantan Barat. Sedangkan penelitian yang dilakukan Andre Bagus Irshanto (2017) berjudul “Kiprah Politik Paguyuban Pasundan Periode 1927-1959”, membahas keterlibatan politik Paguyuban Pasundan dari sebelum kemerdekaan sampai Pemerintah Orde Lama yang dikemas dalam perspektif sejarah.

---

asosiasional setara dengan organisasi yang formal, keanggotaanya melalui prosedur formal. Kelompok ini memiliki pengaruh yang lebih kuat di antara kelompok lainnya.

Penelitian ini lahir dari fenomena yang sering dijumpai peneliti, ketika kandidat politik mendekati paguyuban untuk mendapatkan dukungan, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan; apa yang dimiliki paguyuban etnis ini sehingga sering terlibat dalam aktivitas pemilihan politik lokal. Selama ini, tidak banyak yang menyadari jika hal tersebut bisa terjadi karena adanya sumber-sumber kekuatan politik yang dimiliki paguyuban etnis untuk dimanfaatkan secara politis. Adapun kelebihan dari penelitian ini, peneliti mencoba melihat dari sudut pandang baru dan berbeda dari keberadaan paguyuban etnis Jawa di Provinsi Jambi yang merupakan bagian kelompok kepentingan non-assosiasional, dengan mengkaji secara komprehensif setiap aspek dari sumber-sumber kekuatan politik yang dimiliki Paguyuban Wisnu Murti menggunakan konsep sumber kekuatan politik dari Gabriel Almond dengan fokus fenomena yang terjadi pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Paguyuban Wisnu Murti merupakan satu-satunya wadah perkumpulan etnis Jawa yang cakupannya terbesar se-Provinsi Jambi. Meskipun secara AD/ART Paguyuban Wisnu Murti merupakan organisasi kemasyarakatan di bidang sosial dan budaya, tetapi realitasnya tidak jarang dijadikan sebagai mitra aktor politik dalam meraup suara pada pemilihan. Misalnya, pada dukungan Wisnu Murti ketika pencalonan Zulkifli Nurdin untuk Gubernur Jambi Periode 2005-2010. Seperti yang disampaikan Suwoko selaku Pembina Wisnu Murti berikut:

“....Seringkali menjadi alat politik untuk kepentingan meraih kekuasaan politik, namun tidak melulu dimanfaatkan untuk politik masyarakat jawa saja, suku lain pun seringkali mempergunakan organisasi ini untuk meraih suara pada setiap Pilkada, misalnya pada dukungan Wisnumurti pada pencalonan Zulkifli Nurdin untuk Gubernur Jambi priode 2005- 2010.”<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara Bapak Suwoko (Pembina Wisnumurti) dalam penelitian Bahrul Ulum dan Siti Raudhatul Jannah, *Kosmopolitanisme di Persimpangan Jalan: Hegemoni Sosial-Politik Putra Daerah*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017.

Secara *track record* keterlibatan Paguyuban Wisnu Murti dalam pemilihan politik lokal di Provinsi Jambi bukan lagi menjadi hal baru. Menariknya lagi, pada pemilihan gubernur Jambi Tahun 2020 ketua umum Paguyuban Wisnu Murti Abdullah Sani ikut mencalonkan diri sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Alharis yang juga berasal dari etnis Jawa. Sementara itu, jika merujuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak ada disebutkan larangan untuk ikut kegiatan berpolitik, melainkan adanya larangan mengumpulkan dana untuk partai politik.<sup>19</sup>

Eksistensi Paguyuban Wisnu Murti dalam setiap pelaksanaan kontestasi politik lokal di Provinsi Jambi selalu memberikan daya tarik luar biasa. Hal tersebut bisa terjadi mengingat Paguyuban Wisnu Murti memiliki beberapa sumber kekuatan politik yang menjanjikan. Salah satunya dilihat dari sisi kuantitas (jumlah) etnis Jawa yang merupakan etnis terbesar kedua di Provinsi Jambi, apabila Paguyuban Wisnu Murti berhasil memobilisasi anggotanya maka akan terealisasi suara secara signifikan. Berikut persentase dari masing-masing suku bangsa yang terdapat di Provinsi Jambi.

**Tabel 1.1**  
**Data Suku Bangsa di Provinsi Jambi Tahun 2010**

<b>Suku Bangsa</b>	<b>Persentase</b>
Suku Asal Jambi	44,66 %
Suku Jawa	29,83 %
Suku Minang	5,47 %
Suku Mandailing	3,55 %
Suku Banjar	3,41%
Suku Bugis	3,21%
Suku Sunda	2,64 %
Suku lainnya	7,23%
Total	100%

(Sumber data sekunder: diolah peneliti berdasarkan data BPS sensus penduduk Tahun 2010 melalui: *jambi.bps.go.id*)

<sup>19</sup> Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 59 ayat 2(b): *Ormas dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik.*

Berdasarkan Tabel 1.1 data suku bangsa yang mendiami Provinsi Jambi Tahun 2010 diketahui bahwa; walaupun suku asal Jambi memiliki persentase terbesar mencapai 44,66% dari 3.088.618 populasi masyarakat Jambi Tahun 2010, perihal keberadaan suku pendatang seperti; Jawa (29,83%), Minang (5,47%), Mandailing (3,55%), Banjar (3,41%), Bugis (3,21%), Sunda (2,64%) dan lainnya (7,23%), ikut membuktikan adanya pluralitas suku bangsa yang mendiami Provinsi Jambi.

Bahkan, pada Pilgub Provinsi Jambi Tahun 2020 calon gubernur dan wakil gubernur tidak hanya memprioritaskan suku asli Jambi, melainkan juga melibatkan suku pendatang seperti suku Jawa yang memiliki posisi tawar (*bergaining position*) tinggi. Berikut tabel suku dari masing-masing kandidat beserta suara yang diperoleh pada Pilgub Jambi tahun 2020.

**Tabel 1.2**  
**Suku Kandidat dan Suara Pada Pilgub Jambi Tahun 2020**

<b>Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur</b>	<b>Suku</b>	<b>Suara</b>
Cek Endra-Ratu Munawwaroh	Melayu Jambi-Melayu Jambi	587.918
Fachrori Umar-Syafrial Nursal	Melayu Jambi-Kerinci	381.634
Alharis-Abdullah Sani	Jawa-Jawa	600.733

(Sumber data sekunder: diolah peneliti Tahun 2021 berasal dari berbagai sumber)

Dari data Tabel 1.2 tentang suku kandidat beserta suara pada Pilgub Jambi Tahun 2020, diketahui walaupun kandidat masih didominasi suku asli pribumi Jambi (Melayu Jambi dan Kerinci), namun untuk keterlibatan suku pendatang (Jawa) menempati posisi tersendiri bagi masyarakat Provinsi Jambi. Hal tersebut dibuktikan dengan kemenangan kandidat dari suku Jawa Alharis-Abdullah Sani yang diusung tiga partai politik; PAN (7 kursi), PKS (5 kursi), dan PKB (5 kursi) memperoleh suara sebanyak 600.733, hanya selisih 12.815 suara atau sekitar 0,82% dari pasangan suku asli Jambi lainnya Cek Endra-Ratu Munawaawaroh dengan 587.918 suara, dan Fachrori Umar-Syafrial Nursal dengan 381.634 suara.

Dinamika Pelaksanaan Pilgub Jambi Tahun 2020 yang diwarnai dengan pemilihan suara ulang (PSU) di 88 TPS lima kabupaten/kota Provinsi Jambi seperti; Batanghari, Muaro Jambi, Kerinci, Sungai Penuh dan Tanjung Jabung Timur. Meskipun demikian, Pasangan Alharis-Sani tetap berhasil memenangkan Pilgub Jambi Tahun 2020 dengan kemenangan di tiga kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Muaro Jambi, Merangin dan Kota Jambi yang diketahui sebagai wilayah dengan populasi masyarakat Jawa terbanyak di Provinsi Jambi.

Lebih lanjut, berikut data sebaran Suku Jawa di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.



**Tabel 1.3**  
**Populasi Suku Jawa di kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2010**

No	Kabupaten/Kota	Populasi
1.	Kota Jambi	131.331
2.	Muaro Jambi	140.873
3.	Merangin	117.629
4.	Tebo	136.796
5.	Bungo	78.870
6.	Sarolangun	77.565
7.	Batanghari	70.585
8.	Tanjung Jabung Timur	82.228
9.	Tanjung Jabung Barat	102.851
10.	Kerinci	34.579
11.	Kota Sungai Penuh	3.190
	Total	976.497

(Sumber data sekunder: diolah peneliti berdasarkan BPS Provinsi Jambi diakses melalui: [jambi.bps.go.id](http://jambi.bps.go.id))

Ketika peneliti melihat latar belakang Abdullah Sani yang bukan berasal dari kader partai politik dan hanya berstatus aktif sebagai ketua umum Paguyuban Wisnu Murti, membawa peneliti berasumsi bahwa; Paguyuban Wisnu Murti pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 memanfaatkan sumber-sumber kekuatan politik yang dimiliki untuk Abdullah Sani, dibuktikan dengan kemenangan Abdullah Sani di tiga kabupaten/kota yang merupakan wilayah dengan populasi masyarakat Jawa terbesar di Provinsi Jambi. Serta, adanya dukungan dari

beberapa paguyuban Jawa di kabupaten yang juga bagian dari kesatuan Paguyuban Wisnu Murti Provinsi Jambi. Menurut H. Abdul Hamid Siman selaku ketua Paguyuban Jawa Wijoyo Kusumo Tanjab Barat:

“InsyaAllah kita akan ikut memenangkan Alharis-Sani, apalagi Abdullah Sani adalah tokoh masyarakat Jawa dan merupakan orang Tanjab Barat.”<sup>20</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Sugeng Edi Mujayin selaku tokoh masyarakat Jawa Tanjab Barat berikut:

“Insya Allah nanti kita himpun lebih banyak lagi orang-orang Jawa di sini agar bisa lebih mengembangkan dukungan ke Pak Al Haris-Sani, apalagi Pak Abdullah Sani juga merupakan tokoh masyarakat Jawa Provinsi jambi.”<sup>21</sup>

Kesatuan dukungan dari Paguyuban Wisnu Murti Provinsi Jambi ketika mendukung Abdullah Sani berasal dari rasa solidaritas kekeluargaan sebagai sesama orang Jawa di tanah rantau Jambi (bentuk dari *Gemeinschaft of Place*).<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut munculah pertanyaan penelitian; bagaimana bentuk pemanfaatan sumber-sumber kekuatan politik yang dimiliki Paguyuban Wisnu Murti sebagai kelompok kepentingan non-assosiasional ketika mendukung Abdullah Sani pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan perihal bentuk pemanfaatan sumber-sumber kekuatan politik yang dimiliki Paguyuban Wisnu Murti sebagai kelompok kepentingan non-assosiasional ketika mendukung Abdullah Sani pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020.

---

<sup>20</sup> Radar Desa. 2020. *Pilgub Jambi, Tokoh Jawa Tanjabbar siap dukung Haris-Sani*. Diakses dari, <https://radardesa.co/2020/08/pilgub-jambi-tokoh-jawa-tanjabbar-siap-dukung-haris-sani/>, pada 19/09/2021 pukul 18:27 WIB.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Gemeinschaft of Place* terbentuk berdasarkan kesamaan tempat, dengan kata lain Paguyuban Wisnumurti memiliki solidaritas karena sama-sama berasal dari daerah Jawa yang mendiami tanah perantauan Provinsi Jambi.

#### 1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah pustaka di bidang ilmu politik, khususnya pengembangan konsep sumber-sumber kekuatan politik dari Gabriel Almond, dalam untuk menjelaskan fenomena keterlibatan paguyuban etnis sebagai kelompok kepentingan non-assosiasional dalam arena kontestasi politik lokal.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kinerja Paguyuban Wisnu Murti, sehingga bisa tetap sejalan dengan tujuan dan kapasitas sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial dan budaya.

